

ABSTRAK

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, saat ini banyak tanah negara yang dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya untuk berbagai kebutuhan. Misalnya dimanfaatkan sebagai tempat usaha dagang sebagai sumber perekonomian masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek usaha dagang yang didirikan masyarakat di lahan pemerintah? Dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu untuk usaha dagang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk usaha dagang ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik analisis data berupa observasi langsung ke lokasi lahan milik pemerintah yang dijadikan tempat usaha dagang. Dan juga menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai para pedagang di lokasi tersebut..

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa praktek usaha dagang yang didirikan di atas lahan milik pemerintah di kaki Jembatan Suramadu di sisi Madura belum sesuai dengan ketentuan perolehak hak pakai atas tanah dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021. Dalam hukum Islam pemanfaatan tersebut juga belum sesuai dengan ketentuan dalam pemanfaatn tahan yang dikenal dengan *Iqtā'*

Kata kunci: Tanah Negara, Hukum Islam, Pemanfaatan Tanah

ABSTRAC

State land is a land that is directly controlled by the state, currently a lot of a state land is left and not managed properly. So that it is widely used by the surrounding community for various needs. For example, it is used as a place of trading business as a source of the community's economy. The main problems in this study are (1) How are the trading business practices established by the community on government land? And (2) How does Islamic law review the use of government-owned land at the foot of the Suramadu Bridge for trading businesses?. The purpose of this study is to find out the practice of using government-owned land for trading businesses in terms of Islamic law and Government Regulation No.18 of 2021

This study uses a type of field research using data analysis techniques in the form of direct observation to the location of government-owned land which is used as a place of trading business. And also using interview techniques by interviewing traders at that location.

This study found that the practice of trading business which was established on government-owned land at the foot of the Suramadu Bridge on the Madura side was not in accordance with the provisions for obtaining usufructuary rights over land in Government Regulation No.18 of 2021. In Islamic law, such use has not been in accordance with the provisions. in the use of resistance known as *Iqtā'*.

Keywords: State Land, Islamic Law, Land Utilization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Pertanahan Menurut Hukum Islam.....	9
1. Proteksi Pemerintah	11
2. <i>Iqtā'</i>	11
B. Konsep Pertanahan Menurut Hukum Agraria.....	13
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Objek Penelitian	28
C. Subjek Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV : HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran umum	33
1. Profil Desa Sukolilo Barat	33
2. Sejarah dan profil Desa Pangpong	35
3. Sejarah Suramadu.....	38
B. Praktek Usaha Dandang di atas Lahan Pemerintah Sekitar Wilayah Suramadu	40
C. Praktek Usaha Dagang di atas Milik Pemerintah Sekitar Wilayah Suaramadu Menurut Hukum Islam	48
BAB V : PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	29
Tabel 4.1	35
Tabel 4.2.....	36
Tabel 4.3.....	37